



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Disampaikan pada Rapat Koordinasi
Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang

Malang, 28 Pebruari 2020

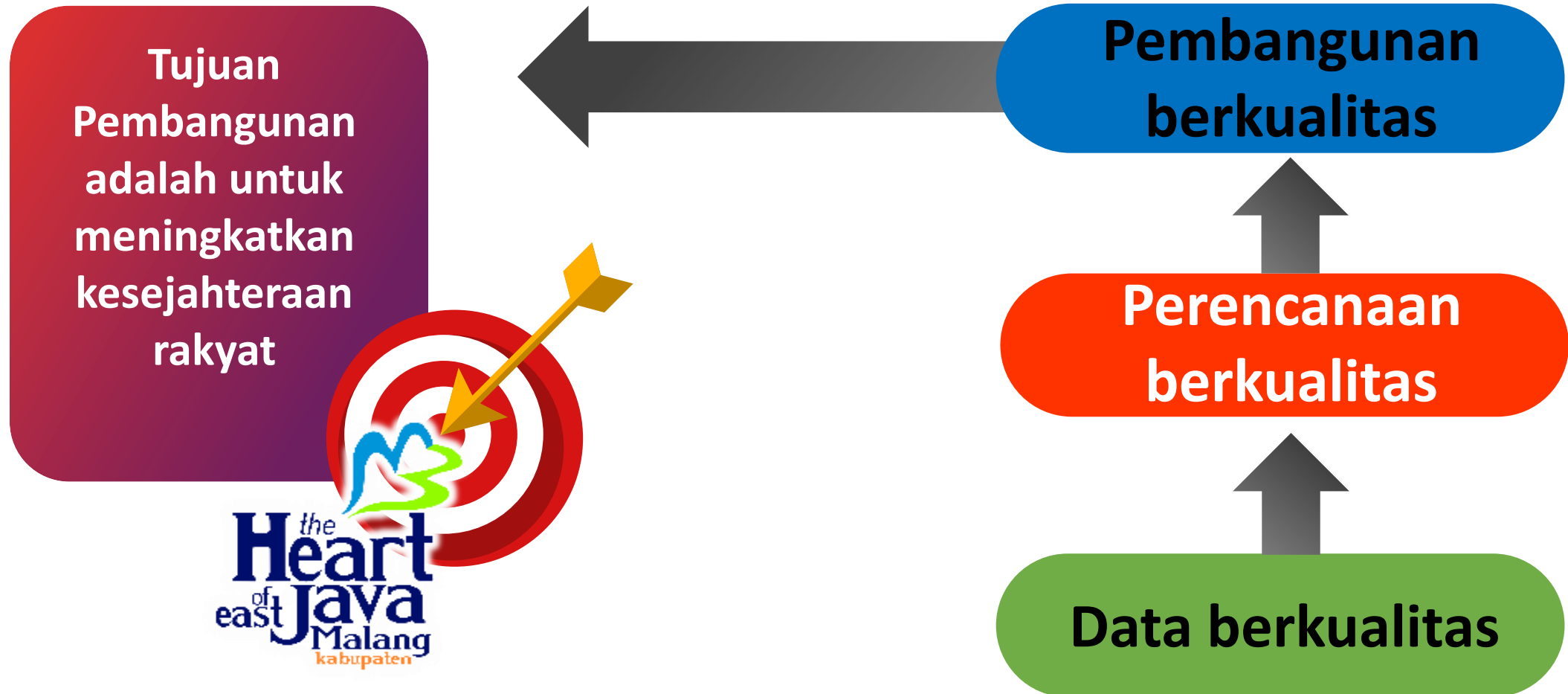
PEMANFAATAN DATA SEKTORAL DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. Tomie Herawanto, MP.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



PERPRES 39/2019: Satu Data Indonesia

TERPADU

MUTAKHIR

AKURAT

PERPRES
39/2019

DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN

MUDAH DIAKSES

MUDAH DIBAGI PAKAIKAN



Melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk





Tiga Jenis Statistik

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997
Tentang Statistik



UU No 16 Tahun 1997 Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya,
jenis statistik terdiri atas:

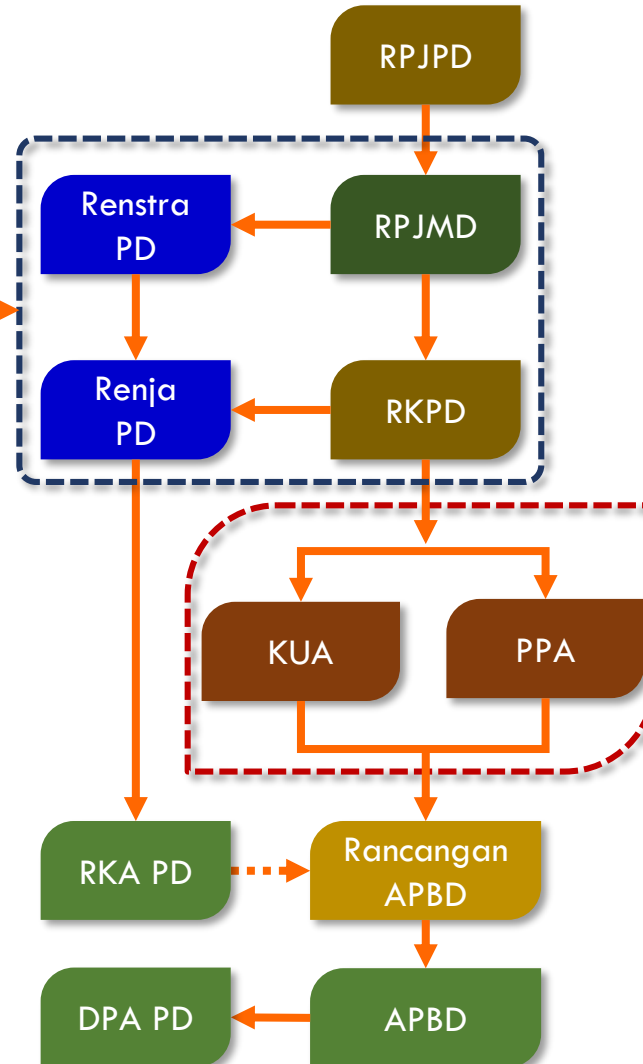
- ❑ **Statistik Dasar**
 - dikumpulkan BPS
- ❑ **Statistik Sektor**
 - dikumpulkan instansi
- ❑ **Statistik Khusus**
 - dikumpulkan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

STATISTIK SEKTORAL adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.



ARSITEKTUR DOKRENDA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 86/2017

Program & kegiatan masuk ke dalam RKPD & Renja PD



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.

Ruang Lingkup Urusan Pembangunan yang memerlukan data pembangunan

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

W A J I B

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi serta Kepentingan Strategi Nasional

P I L I H A N

**PELAYANAN
DASAR**

**NON PELAYANAN
DASAR**

- 6 URUSAN**
- Pendidikan
 - Kesehatan
 - Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
 - Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
 - Sosial.

18 URUSAN

- Tenaga Kerja
- Pemberdayaan Perempuan & P. A
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan Hidup
- Administrasi kependudukan dan Capil
- Pemberdayaan Masy & Desa
- Pengendalian Penduduk & KB
- Perhubungan;
- Komunikasi & informatika
- Koperasi UKM
- Penanaman Modal
- Kepemudaan dan Olah Raga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan;
- Perpustakaan;
- Kearsipan.

8 URUSAN

- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan;
- ESDM
- Perdagangan;
- Perindustrian; dan
- Transmigrasi.

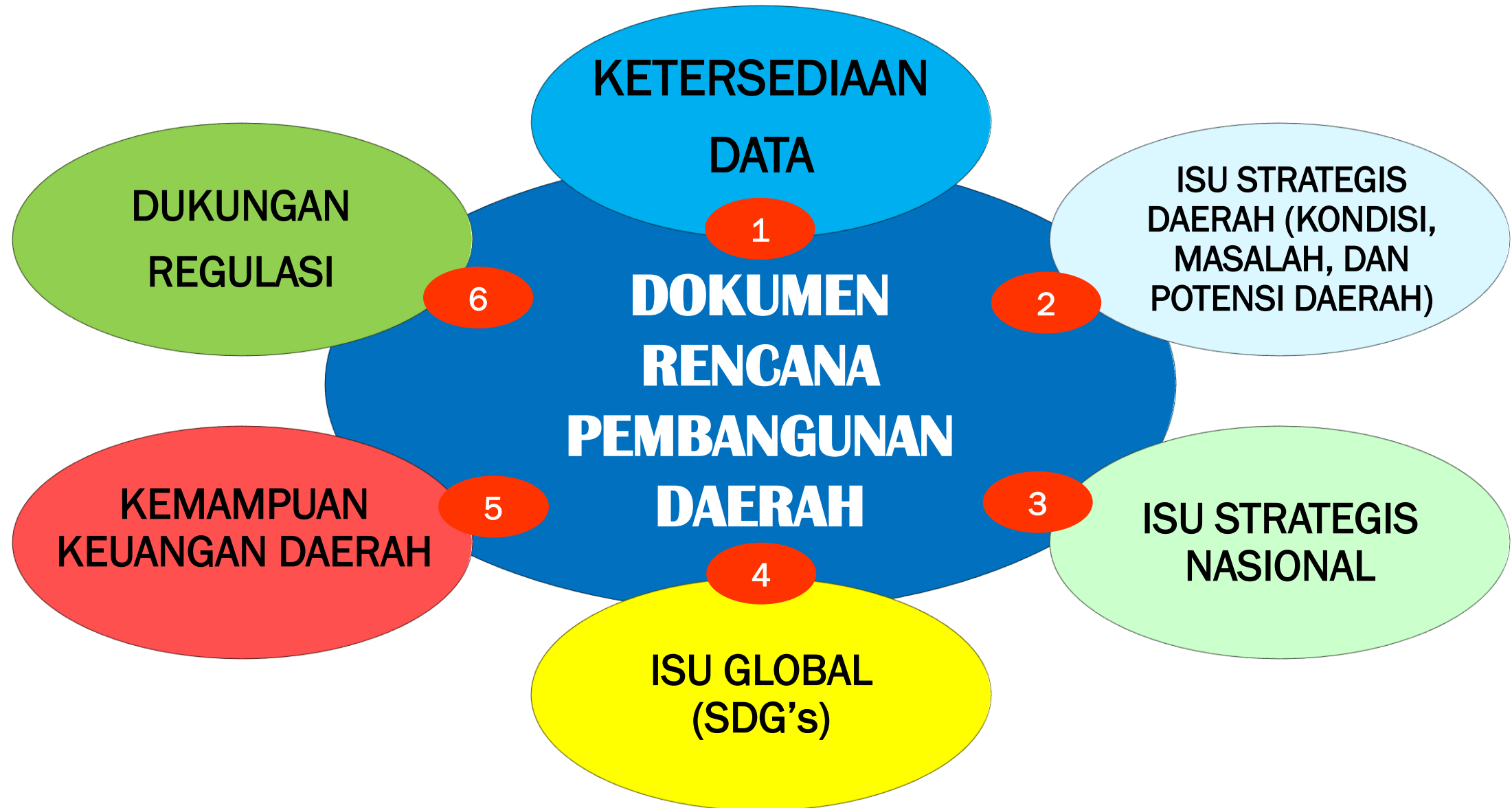
Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai ke daerah Provinsi (Kehutanan, Kelautan dan Pertambangan) sehingga relatif mudah dikendalikan

Peran Data dalam Perencanaan Pembangunan



- > Dalam UU No. 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- > Penyelenggaraan statistik sektoral harus didasarkan pada kebutuhan data dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah

FAKTOR PENTING DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



KETERSEDIAAN DATA STATISTIK DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH



**DATA STATISTIK
(DASAR MAUPUN SEKTORAL)**

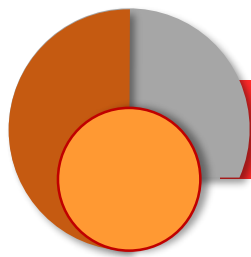


PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN



- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Renstra dan Renja SKPD;
- Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan;
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
- Analisa Dokumen dan Study Kegiatan Pembangunan.

**DATA SANGAT
PENTING**

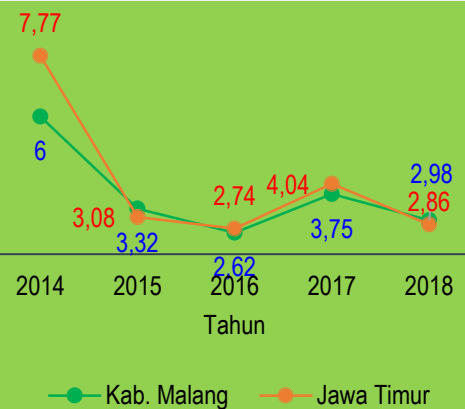


KETERSEDIAAN DATA INDIKATOR STRATEGIS

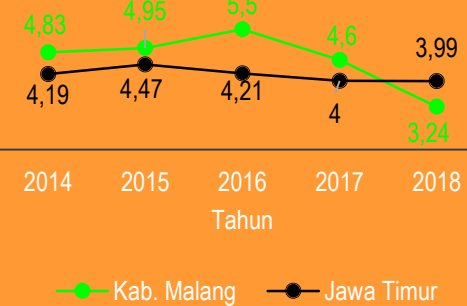
PERTUMBUHAN EKONOMI



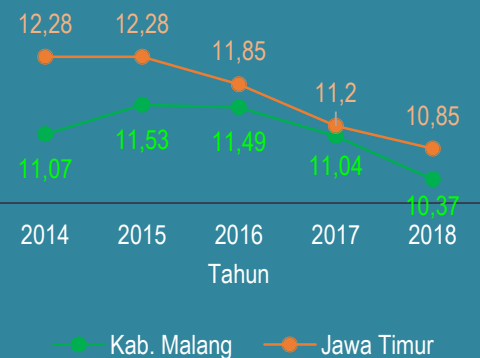
INFLASI



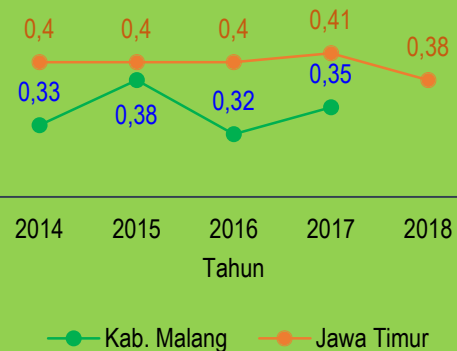
PENGANGGURAN



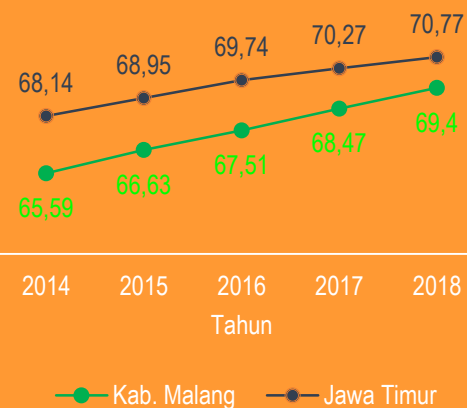
KEMISKINAN



GINI RATIO



IPM



OPD harus mampu memahami target pembangunan pemerintah daerah

Tiap target dipetakan dalam indikator yang bisa menggambarkan capaian target tersebut

Indikator dari tiap OPD biasanya ditampilkan dalam bentuk data administrasi

Data administrasi dapat dikumpulkan dalam periode harian, bulanan, dan tahunan melalui sistem dalam OPD

Data administrasi adalah
Kekuatan Statistik Sektoral



• **GOOD** •
PLANNING
BEGINS WITH
GOOD DATA

BAPPEDA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

